

BAB III

PEMEKARAN KOTA MALANG

A. Rencana Perluasan Wilayah Kota

Sebuah wilayah pemukiman yang terbentuk sebagai akibat dari perluasan sektor ekonomi, politik maupun sosial secara pasti akan menunjukkan angka pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Pertumbuhan penduduk disuatu wilayah akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap lahan untuk berbagai keperluan, misalnya penambahan lahan pemukiman dan industri sebagai lapangan pekerjaan dan sebagainya. Perluasan ini merupakan hal yang sudah sewajarnya mengingat perubahan-perubahan itu memiliki keterkaitan erat terhadap eksistensi sebuah wilayah. Perluasan wilayah perkotaan, merupakan suatu kejadian alami yang biasa terjadi akibat kebutuhan yang sangat mendesak bagi perkembangan kota secara fisik. Penggunaan lahan secara eksplisit tidak disebut karena '*land use*' kekotaan sendiri pada hakekatnya merupakan pencerminan fungsi dari pada bangunan-bangunan dan jalan-jalan yang ada pada suatu areal.¹

Perluasan wilayah kota Malang secara nyata mulai tampak setelah pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, salah satu contoh adalah perpindahan secara administrasi pengiriman barang-barang ekspor melalui pelabuhan

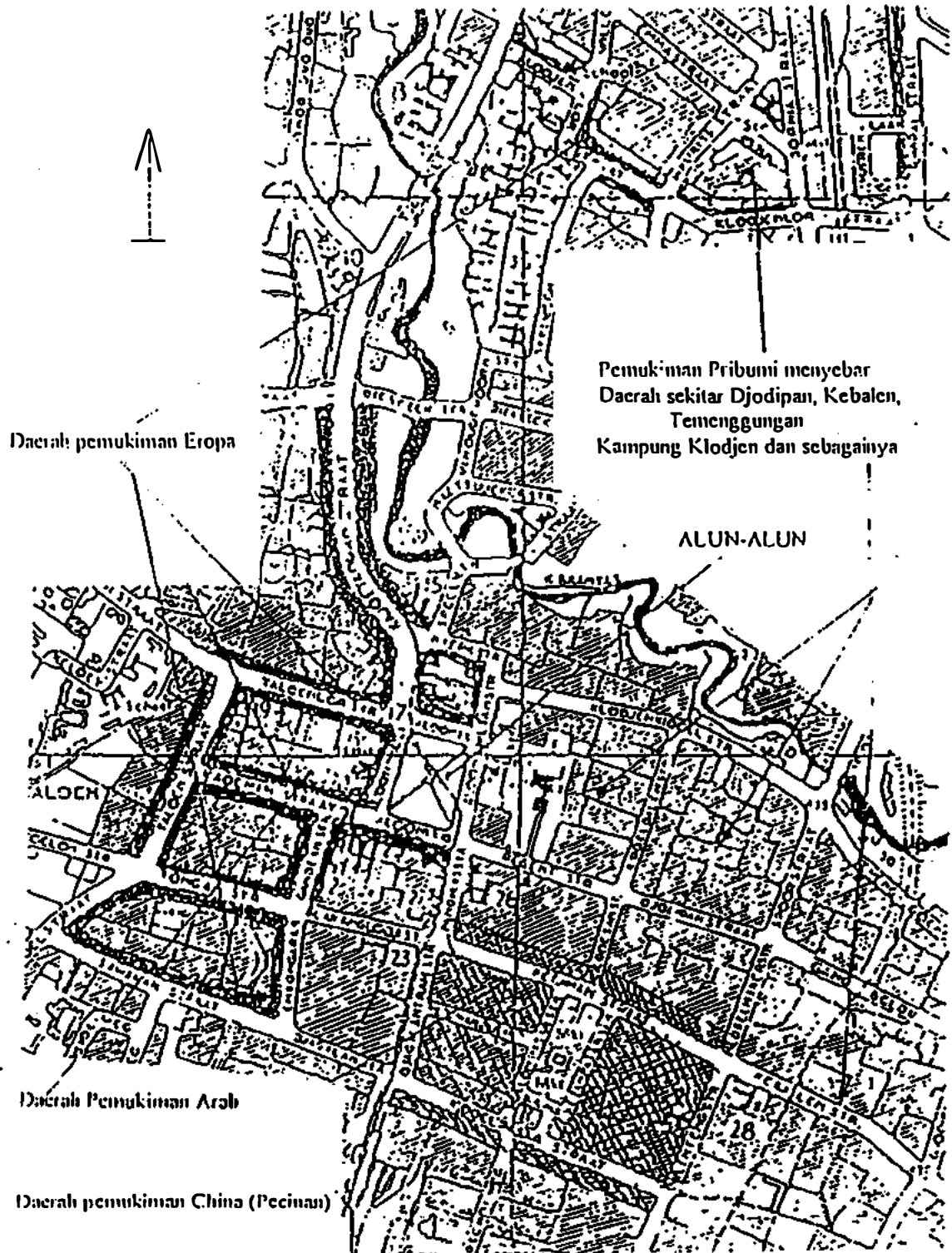
¹ Hadi Sabari Yunus, *Struktur Tata Ruang Kota* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 108.

Surabaya. Berawal dari peristiwa itu maka pelabuhan Pasuruan yang sudah biasa melakukan pengiriman hasil-hasil pertanian atau hasil bumi dari wilayah Timur Jawa menjadi *stag* atau berhenti. Para pemborong dan pemilik perkebunan besar yang semula mendirikan gudang-gudangnya di daerah ini mengalih fungsikan gudang sekaligus menggelar barang-barangnya untuk diperjualbelikan. Lambat laun daerah pergudangan ini tumbuh pesat karena banyak menyerap tenaga kerja kasar yang berasal dari etnis Jawa dan Madura yang bermigrasi dari pelabuhan Pasuruan.²

Perluasan-perluasan semakin tidak terkontrol, hal utama yang menjadi prioritas pengamatan tidak lain adalah pertumbuhan penduduk di wilayah ini. Tahun 1890 total jumlah penduduk kota Malang sebesar 12.040 jiwa, 15 tahun kemudian yaitu tahun 1905 angka tersebut beralih menjadi 29.584 jiwa, adalah 17.544 jiwa penduduk dari multi etnis itu bertambah dalam kurun waktu itu.³ Bisa dibayangkan jika penambahan penduduk disuatu wilayah terus terjadi secara kontinyu, maka pelebaran wilayah dengan sendirinya akan terjadi. Banyak faktor yang mendorong proses peledakan jumlah penduduk, faktor satu dengan lainnya saling terkait. Pada tahun 1914 ketika pemerintah pusat memberlakukan kebijakan desentralisasi bagi Malang, luas wilayah kota waktu itu diketahui mencapai 1503 Ha. dengan konsentrasi pemukiman menyebar seperti tebaran jaring. Wilayah pemukiman tidak saja terpusat pada satu titik melainkan lebih luas dan menyebar,

² A. Van Schaik, *Malang Beeld Van Een Stad*, (Purmerend: Asia Major, 1996), hlm. 19. wilayah ekonomis tersebut menjadi sentra perdagangan di Malang, namun menurut buku yang sama dinyatakan tidak ada keterangan lebih terinci mengenai kedudukan sentra dagang itu.

³ *Ibid.*, hlm., 29.



Gambar 3. Daerah Hunian Kota Malang

Sumber: Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang

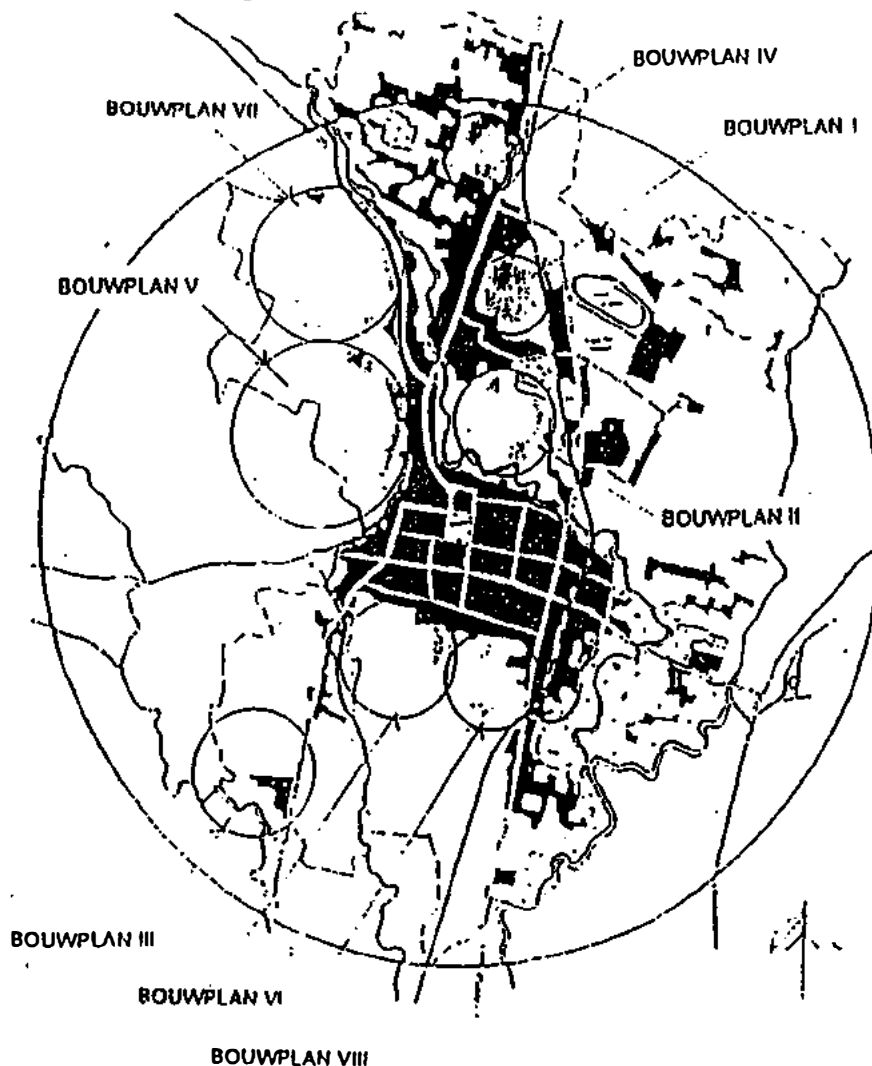
sedikit menjauh dari pusat kota. Bentuk kota Malang akibat persebaran ini menyerupai jejala atau sistem *grid*.⁴ Sistem ini merupakan bentuk dan karakter dari kota benteng yang biasa terbentuk di kota-kota jajahan. Pihak kolonial menerapkan bentuk *grid* guna memudahkan menetapkan wilayah-wilayah dalam kota dan tentu saja wilayah tersebut harus memiliki akses langsung kepusat kota untuk memudahkan kontrol atau pengawasan.

Malang setelah menjadi kotamadya atau *Gemeente* mulai berbenah dan mempersiapkan diri menjadi sebuah kota swadaya. Keinginan itu diwujudkan dalam berbagai rencana pembangunan yang kontinyu sejak sekitar tahun 1916 terhadap perluasan dan pengadaan lahan dalam kota. Rencana perluasan dibagi menjadi delapan bagian perencanaan perluasan kota yang disebut *bouwplan*. Sasaran pertama yang akan mengalami perluasan adalah daerah antara Claket dan Rampal. Pemerintah membeli lahan-lahan persawahan yang masih terhampar di sepanjang wilayah tersebut.⁵ *Bouwplan* I dilaksanakan dengan perhitungan yang matang dengan tujuan mencegah perluasan kota kearah Utara atau arah menuju Surabaya, maka terciptalah sebuah kawasan pemukiman masyarakat Eropa yang

⁴ Istilah jejala yang menjelaskan maksud dari sistem grid adalah hasil kutipan dari Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang* (Yogyakarta: ANDI bekerjasama dengan Universitas Kristen PETRA, 1996).. hlm. (30,31); Handinoto, "Studi tentang Kota Malang, Sebuah Kota yang Dirancang Dengan Baik Pada Masa Kolonial (1914-1940)". Sebuah Makalah Karya Ilmiah tidak diterbitkan, Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, Universitas Kristen PETRA-Surabaya, 1998, hlm. 4. Sistem *grid* atau *Bastides Cities* berarti kota benteng. Bagian-bagian kotanya dibagi-bagi sedemikian rupa menjadi blok-blok empat persegi panjang dengan jalan-jalan yang paralel longitudinal dan transversal membentuk sudut siku-siku. Jalan-jalan utamanya membentang dari pintu gerbang utama kota sampai alun-alun utama atau pasar utama pada bagian pusat kota. Hadi Sabari Yunus, *op. cit.*, hlm. 150

⁵ A. Van Schaik, *op. cit.*, hlm. 32

bernama *Oranjebuurt*.⁶ Pembangunan ini menggunakan lahan sekitar 12.939 meter persegi meliputi 4.377 meter persegi dilaksanakan pembangunan dan 8.562 meter persegi tanah kosong.⁷ Lahan yang menjadi sasaran pembangunan berada di daerah Rampal sampai sepanjang *Sophiastraat* (jalan Sophia atau Jalan Cokroaminoto, sekarang).⁸



Gambar 4. Wilayah-wilayah dalam Rencana Pembangunan (*Bouwplan*)
 Sumber: *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang*

⁶ Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur...*, *op. cit.*, hlm. 62.

⁷ *Stadsgemeente Malang 1958*, hlm. 172.

⁸ *Ibid.*, hlm. 168.

meter persegi.¹¹ Rencana pembangunan pemukiman ini didasarkan pada rapat dewan kota tanggal 26 Agustus 1919 dan 26 April 1920.¹²

Pada *houwplan* IV pemerintah mengadakan pembangunan sebuah kawasan pemukiman di Lowokwaru sebesar 8 Ha. Pemukiman ini akhirnya tidak seperti yang digambarkan sebagai pemukiman yang nyaman.¹³ Daerah Lowokwaru adalah sebuah wilayah disektor Utara yang berdekatan dengan daerah industri dan rumah penjara pemerintah. Para pemukim merasa kurang nyaman akibat terlalu ramainya suasana industri dengan para pekerjanya. Pada rencana ini pula dilakukan perbaikan atas rumah Cina sepanjang sungai Brantas, kompleks militer di Rampal dan lingkungan industri *Malangsche Stoomtram Maatschappij*.¹⁴ Pembangunan yang telah dilakukan di kota Malang sampai pada tahun 1935 sebesar 67% dari total luas tanah milik pemerintah kota.¹⁵ Rencana pembangunan kelima (*Bouwplan V*) pemerintah meneruskan pembangunan di sekitar jalan Kawi. Pembangunan ini menghubungkan jalan-jalan utama arah Barat-Timur dengan pusat kota, yaitu berawal dari stasiun kereta api, terus kearah *Daendels Boulevard* memotong jalan Kayutangan terus kearah Timur melewati

¹¹ *Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.* hlm. 168.

¹² Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur...* op. cit. hlm. 68

¹³ A. Van Schaik, *loc. cit.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.* hlm. 40

Bouwplan II lebih pada penyelesaian dan pemeliharaan pembangunan yang dilakukan pertama kali (*Bouwplan I*) yaitu sepanjang *Imhoffstraat* sampai *Sophiastraat*. Namun bukan berarti pemerintah kota tidak melakukan perluasan di daerah lain. Pembelian tanah atau lahan perluasan dilakukan dengan sistem pertukaran dengan pihak-pihak lain yang menguasai tanah di wilayah tujuan perluasan. Tahun 1920 ini pertukaran tanah dilakukan oleh pemerintah kota dengan Departemen Pertahanan atau Perang (*Departement van Oorlog*), Departemen Lalu Lintas dan Pemeliharaan Jalan (*Departement van Verkeer en Waterstaat*) dan juga Perusahaan Perkeretaapian Negara (*Staatsspoorwegen*). Selain itu, pemerintah juga membeli tanah milik Pabrik Metal 'WECO' seluas 907 meter persegi dengan cara mengangsur.⁹ Pada rencana pembangunan ini pula direalisasikan pengerjaan Alun-alun Bunder sebagai *Gouvernueur Generaalhuurt* atau pusat pemerintahan yang baru.¹⁰ Pelaksanaan pembangunan kawasan Alun-alun Bunder ini diawali pada tahun 1922 atas prakarsa J.J. Coert, seorang *Assisten Residen* kedua Malang.

Perluasan kota ketiga (*Bouwplan III*) dilaksanakan khusus untuk mendirikan kompleks pekuburan atau pemakaman bagi warga Eropa (*Europeesche Begraafplaats*) di daerah Sukun. Pembangunan pemakaman ini hanya menggunakan 3.740 meter persegi dari total luas tanah pemerintah ± 225.957

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur...op. cit.* hlm. 66.

meter persegi.¹¹ Rencana pembangunan pemukiman ini didasarkan pada rapat dewan kota tanggal 26 Agustus 1919 dan 26 April 1920.¹²

Pada *bouwplan* IV pemerintah mengadakan pembangunan sebuah kawasan pemukiman di Lowokwaru sebesar 8 Ha. Pemukiman ini akhirnya tidak seperti yang digambarkan sebagai pemukiman yang nyaman.¹³ Daerah Lowokwaru adalah sebuah wilayah disektor Utara yang berdekatan dengan daerah Industri dan rumah penjara pemerintah. Para pemukim merasa kurang nyaman akibat terlalu ramainya suasana industri dengan para pekerjanya. Pada rencana ini pula dilakukan perbaikan atas makam Cina sepanjang sungai Brantas, kompleks militer di Rampal dan lingkungan industri *Malangsche Stoomtram Maatschaapij*.¹⁴ Pembangunan yang telah dilakukan di kota Malang sampai pada tahun 1935 sebesar 67% dari total luas tanah milik pemerintah kota.¹⁵ Rencana pembangunan kelima (*Bouwplan* V) pemerintah meneruskan pembangunan di sekitar jalan Kawi. Pembangunan ini menghubungkan jalan-jalan utama arah Barat-Timur dengan pusat kota, yaitu berawal dari stasiun kereta api, terus kearah *Daendels Boulevard* memotong jalan Kayutangan terus kearah Timur melewati

¹¹ *Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.* hlm. 168.

¹² Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur...*, *op. cit.* hlm. 68

¹³ A. Van Schaik, *loc. cit.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.*, hlm. 40

jalan Semeru dan berakhir di *Semeroe Park* atau taman Semeru. *Bouwplan V* ini wilayah perluasannya masih berhubungan dengan *Bouwplan II*.¹⁶

Daerah *Eilandenbuurt* atau daerah pulau-pulau, disebut demikian karena pemukiman yang berada di wilayah ini memiliki nama-nama jalan dengan nama berbagai pulau di nusantara seperti: *Lombokweg* (jalan Lombok), *Jawaweg* (jalan Jawa), *Soembaweg* (jalan Sumba) dan sebagainya merupakan sasaran perluasan berikutnya.¹⁷ Daerah perluasan kota yang keenam (*Bouwplan VI*) yang dilaksanakan pada tahun 1930 meliputi pembangunan bermacam-macam pemukiman. Jenis-jenis pemukiman yang dibangun terdiri dari Villa, rumah-rumah kecil (*Kleinwoningtype*), rumah dengan tipe khusus dan rumah-rumah toko. Total luas tanah yang dipergunakan adalah 70.901 meter persegi. Pemerintah menetapkan harga sewa sebesar f 1.50 sampai f 2.50 sebulan tergantung jenis tipe yang ditawarkan.¹⁸

Rencana perluasan pembangunan kota ketujuh dan kedelapan merupakan perencanaan perluasan yang dilakukan untuk menyelesaikan pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. *Bouwplan VII* dimaksudkan sebagai lanjutan perluasan bagian Barat kota yang sudah dimulai sejak *Bouwplan*

¹⁶ Jalan utama dalam kompleks perluasan *Bouwplan V* ini adalah Jalan *Idjen* yang membujur ke arah Utara-Selatan. Jalan *Idjen* yang megah dengan pohon-pohon Palmnya lebih semarak lagi dengan banyaknya taman-taman. Jalan ini merupakan salah satu jalan yang paling indah di antara kota-kota Hindia Belanda pada waktu itu. Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur...*, *op. cit.* hlm. 76-77.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁸ *Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.*, hlm. 169.

V. Sedangkan pada *Bouwplan* VIII yang dilaksanakan pada tahun 1935 ini pemerintah memfokuskan pada perluasan dan penambahan daerah industri.¹⁹

B. Unsur Penting Pendukung Kota

1. Alun-Alun Sebagai Pusat Kota

Mengikuti perkembangan karakteristik kota-kota di Indonesia, terutama kota-kota di Jawa dengan sebuah lapangan besar tepat di jantung kota adalah fenomena klasik demi sebuah tujuan pemersatu.²⁰ Membayangkan alun-alun yang begitu besar, luas dan terbuka dengan pohon beringin tepat di tengah-tengah merupakan satu simbol adanya ketunggalan dalam kepemimpinan sebagai pengayom. Keberadaan tanah lapang di pusat kota atau alun-alun merupakan strategi pemerintah pada zaman masyarakat kuno untuk mengumpulkan penduduknya setiap waktu diperlukan. Berdasarkan fungsi itu tak heran bila kemudian pada masa pemerintahan kolonial fungsi tersebut diteruskan dengan pengaturan tata letak pusat-pusat pemerintahan. Generalisasi Alun-alun serta tata letak bangunan pendukung pemerintahan yang terdapat di hampir semua kota-kota di Jawa, tidak cukup memberikan penjelasan tentang keberadaan Alun-alun di kota Malang yang sangat *kontroversial*.²¹ Pada dasarnya keseragaman mengenai

¹⁹ Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur.... op. cit.* hlm. 94.

²⁰ Kata pemersatu disini lebih berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya. Pada masa kerajaan Jawa, alun-alun digunakan oleh raja untuk menggelar berbagai kegiatan kesenian rakyat dan mengadakan semacam rapat raksasa untuk mendiskusikan atau menyampaikan sesuatu hal yang berkenaan dengan kehidupan bersama dalam wilayah kekuasaan raja.

²¹ Kata 'Kontroversial' disini lebih pada penekanan arti dari sebuah ketidakwajaran dalam sebuah kota dengan dua pusat pemerintahan. Malang yang memiliki dua buah Alun-alun. Alun-alun pertama dibangun pada tahun 1882 berada di sisi selatan sungai Brantas sedangkan Alun-alun

keberadaan Alun-alun itu sudah diusahakan namun karena kondisi-kondisi tertentu maka ada sedikit hambatan terhadap penempatan kantor dan fasilitas pemerintahan. Oleh karena itu penyatuan antara dua pusat pemerintahan terpaksa tetap dilaksanakan di kota Malang.

Alun-alun kota Malang yang menggambarkan suasana masyarakat Jawa tradisional telah lama ada sebagai peninggalan zaman pemerintahan lama. Alun-alun ini dibangun kembali oleh pihak kolonial pada tahun 1882 demi melengkapi kepentingan ekonomi dan pemerintahannya pada awal pendudukan.²² Berbagai akses bagi kemudahan aktivitas pemerintahan dan ekonomi maka pembangunan diprioritaskan untuk membangun jalan. Jalan-jalan utama dalam kota dibuat dan diatur menuju ke pusat kota atau Alun-alun.²³ Sebuah pusat kota adalah suatu tempat dimana segala kegiatan masyarakat yang berada di dalam kota itu berlangsung. Dari pusat kota juga kegiatan perkotaan dan perencanaan kota dibentuk dan diciptakan. Pokok-pokok rumusan permasalahan kota dan penduduk

kedua dibangun tahun 1922 atau yang disebut dengan Alun-alun Bunder terletak di sebelah timur sungai Brantas. Kondisi ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah sudut pandang yang lebih indah dengan memposisikan sungai Brantas tepat membelah kota Malang.

²² Alun-alun ini adalah simbol dari kekuasaan lama, dan masih mempertahankan konsep kosmologi Jawa. Bentuknya yang dari semula persegi panjang dan dikelilingi pohon-pohon beringin di sepanjang sudut-sudutnya kemudian mengalami perubahan tatkala diadakan pembangunan itu. Adanya perbedaan letak kantor kabupaten (berada disebelah Barat alun-alun), dan rumah asisten residen disebelah selatan alun-alun (seharusnya berada di sebelah utara alun-alun dan menghadap kantor Kabupaten). Kejelasan bentuk dan tata ruang disekitar alun-alun dapat dibaca Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur.., op. cit.*, hlm., 19-31. Faktor ekonomis yang menghiasi Alun-alun pada masa itu, karena kegiatan pengumpulan hasil-hasil produksi daerah sekitar kota Malang sebelum akhirnya menuju ke pelabuhan dilaksanakan di pusat kota ini.

²³ Misalnya Jalan utama dari arah Utara melewati Kayutangan-Alun-alun; dari arah Timur melewati Klojen Kidul-Alun-alun, Jodipan-*Regentstraat*-Alun-alun; dari arah Selatan melewati Pecinan-jalan Pandhu atau Jagalan-jalan Pandhu kemudian menuju Alun-alun; lalu yang terakhir dari arah Barat masuk jalan Taiun-Alun-alun atau Kauman-Alun-alun. (*Linat Kaart van de Stads Gemeente Malang tahun 1940) Stads Gemeente Malang 1938*, hlm., 166.

kota ditangani oleh bagian administrasi kota di dalam kantor pemerintahan. Oleh karena itu berdirilah kantor Asisten Residen disebelah selatan Alun-alun, sedangkan kantor Kabupaten yang menghadap ke *Regenstraat* posisinya berada disebelah Timur Alun-alun. Tempat peribadatan umat muslim atau masjid, dibangun tahun 1875 disebelah Barat Alun-alun. Gereja Protestan tepat berada disamping kiri masjid dan gereja Katholik berada dibagian utara Alun-alun. Pasar dibangun disekitar daerah Pecinan yang berada disebelah Tenggara.²⁴

Aktivitas Alun-alun sebagai sarana olahraga juga terjadi pada masa itu. Banyak masyarakat yang menggunakan lapangan luas tersebut sebagai tempat olahraga yang murah meriah. Berbagai aktifitas olahraga juga sempat meramaikannya, sebagai contoh; adanya perlombaan lompatan dan lari sebelum dibangun *Malangsche Sportclub*. Namun izin untuk kegiatan ini dicabut pada tahun 1917 dikarenakan area ini hanya dikhususkan untuk pasukan *cavaleri* berlatih.²⁵

Sciring dengan semakin meningkatnya kebutuhan lahan dan melebarnya wilayah pemukiman ke arah Utara dan Barat maka pemerintah memutuskan untuk membangun pusat kota lebih ke arah Utara. Bangunan yang baru ini kemudian dikenal sebagai Alun-alun Bunder atau Alun-alun Tugu, sekarang. Berdasar pada keputusan pemerintah tahun 1920, atas prakarsa J.J. Coert terhadap pelaksanaan

²⁴Semula gereja Protestan ini juga digunakan secara bergantian dengan umat Katholik. Namun sejak 1896 mereka memisahkan diri dengan dibangunnya gereja Katholik. Kantor Karesidenan pada saat itu belum ada disekitar Alun-alun ini. Lihat Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur.. op. cit.*, hlm., 47-57 dan Supiyati Rosmiyah, *op. cit.*, hlm., 19.

²⁵*Kroniek Stadsgemeente Malang 1914-1939*, hlm., XVI. Pasukan Cavaleri adalah pasukan berkuda atau yang menggunakan kendaraan baja.

pembangunan Alun-alun Bunder sebagai pusat kota dan pemerintahan mulai dikerjakan. Keputusan ini dilakukan untuk membatasi adanya perluasan kota kearah Selatan yang jauh dari pemukiman Eropa yang berada disebelah Utara.²⁶ Mereka sangat tidak menginginkan adanya perluasan yang jauh dari jangkauan, karena masa itu adalah masa kolonial dimana segala keputusan dan perubahan harus berdasarkan sepengetahuan dan campur tangan mereka.

Alun-alun kedua inilah yang dijadikan sebagai sentral oleh pihak kolonial. Gedung balai kota yang saat itu lebih dikenal sebagai *Stadshuis* atau kotapraja didirikan berdasarkan rapat Dewan kota tanggal 14 Februari 1927. Dengan demikian kota Malang memiliki sebuah gedung sebagai pusat pemerintahan.²⁷ Balai kota ini jika dilihat dari depan Alun-alun Bunder dengan air mancur di tengah-tengah akan terlihat indah dan teratur. Disebelah Timur Alun-alun terdapat stasiun kereta api baru.

2. Pemukiman Penduduk dan Fasilitasnya

Perkembangan wilayah pemukiman di kota Malang sangat terkait erat dengan penguasaan kota ini oleh kolonial pada tahun 1767. Sebagaimana penaklukan wilayah di berbagai daerah di Hindia Belanda, maka setelah menduduki Malang, VOC mendirikan sebuah benteng untuk memperkuat

²⁶ Selain itu adanya kekhawatiran dari sebagian penduduk Eropa tentang bentuk kota kolonial yang mereka ingin diwujudkan di kota Malang tidak tercapai. Alun-alun lama bagi mereka adalah simbol dari kekuasaan pemerintahan Jawa, oleh karena itu untuk membentuk sebuah karakteristik kota kolonial, maka dewan kota membuat keputusan pembangunan Alun-alun Bunder.

²⁷ AJ. Purwanto, dkk. *Penelusuran Jejak-jejak Sejarah Perjuangan Bangsa dan Aspek Feletariannya di Kota Malang dan Sekitarnya* (Malang: LPM IKIP Malang, 1990), hlm. - sebelum di bangun balai kota, para pejabat pemerintahan menempati rumah sewaan untuk mengendalikan pemerintahan dikawasan Klojen Kidul.



kedudukannya.²⁸ Pemukiman orang-orang Eropa yang pertama kalinya hanya berada disepular benteng, daerah yang disebut *Klodjen*. Mereka belum berani melebarkan sayap dan membangun tempat bermukim yang lebih jauh karena takut dengan serangan penduduk pribumi yang bisa jadi menolak kehadiran mereka. Malang mulai pesat perkembangannya dan menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1812. Pada saat itu Malang masih menjadi wilayah karesidenan Pasuruan dan dipimpin oleh seorang asisten Residen.²⁹ Sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda, Malang secara bertahap membangun wilayahnya menjadi wilayah pemukiman. Waktu itu daerah pemukiman baru yang sudah mulai berkembang berada di daerah sekitar Claket dan wilayah sebelah Barat sungai Brantas.³⁰

Kebijakan kolonial dengan penetapan wilayah-wilayah tertentu dikawasan Hindia Belanda, digunakan untuk pemukiman penduduk dari asal daerah kelompok etnis tertentu, pengaturan wilayah dengan kelompok pemukimannya

²⁸Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur...*, *op. cit.*, hlm. 15. Di dalam lingkungan benteng ini hidup dan berkembang pula keluarga-keluarga Belanda. Mereka akhirnya mendirikan berbagai fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan kalangan intern mereka sendiri. Berdirinya sebuah rumah sakit adalah satu di antara macam fasilitas yang ada di dalam benteng.

²⁹Suwardono dan Supiyati Rosmiayah, *loc.cit.* Lihat *Staatsblad no.297 tahun 1914* tentang Deentralisasi. Dalam lebaran negara ini disebutkan bahwa kotapraja Malang yang menjadi bagian dari karesidenan Pasuruan memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri rumahtangga wilayahnya. Sejumlah dana dialokasikan khusus untuk masalah ini. Jadi dikeluarkannya peraturan pemerintah yang merupakan perpanjangan dari peraturan sebelumnya tertanggal 14 Maret 1908 dalam lembaran negara nomor 247 tentang pemisahan kewenangan karesidenan Pasuruan terhadap kotapraja Malang mulai diberlakukan saat itu.

³⁰Perluasan areal pemukiman yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan beberapa tahapan rencana pembangunan (*Boisplan*). Setiap tahapan dalam rencana tersebut selalu diawali dengan proses penguasaan tanah dari masyarakat yang sebelumnya menempati lahan kepada pemerintah. Tahap pertama dari rencana pembangunan dilaksanakan pada tahun 1917 di daerah sebelah Utara *Wilhelminastraat*. (masuk kawasan Claket). Kawasan ini adalah kawasan golongan masyarakat Eropa. *Kroniek Stads Gemeente Malang 1914-1939*, *op. cit.*, hlm. XXXV.

dilaksanakan melalui kepala-kepala kelompok suku bangsa yang diangkat oleh pemerintah kolonial.³¹ Pemukiman-pemukiman yang banyak dibangun untuk masyarakat Eropa berada di sebelah Utara melalui Oro-oro Dowo sampai jalan Panggung yang sekarang, daerah Claket, daerah Lowokwaru yang bersceberangan dengan bangunan penjara, Talun, Sawahan dan sebagian di Kayutangan.³² Pemukiman Cina atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Pecinan berada di Tenggara Alun-alun. Komunitas ini bermukim didaerah Kotalama, dan daerah sekitar pasar Besar. Penduduk pribumi mendominasi area perkampungan, walaupun masih berada disekitar kota namun persebaran mereka lebih kearah pinggiran. Daerah Kebalen, Temenggung, Jodipan, Talun, dan Klojenlor adalah daerah-daerah yang didominasi oleh penduduk pribumi.³³

³¹Djoko Soekiman, *Kehudayaan Indies: Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa* (Yogyakarta: Bentang, 2000), hlm., 194. Jabatan yang diberikan untuk kepala-kepala kelompok suku bangsa itu antara lain: Kommandant, Luitnant atau Kapitein atau Majoor. Kebijakan tentang pembagian wilayah pemukiman berdasarkan suku bangsa itu sering disebut sebagai *Wijkenstelsel*. Kebijakan ini sudah tidak berlaku (dihapus) sejak tahun 1900-an, walau masih terdengar dan tercantum dalam sebuah wacana nama-nama pemukiman Eropa atau pemukiman China dan sebagainya namun itu hanya sebuah klasifikasi wilayah tanpa ada maksud mengkotak-kotak masyarakatnya. Pembagian masyarakat ke dalam wilayah-wilayah tertentu sudah tidak lagi berlaku, mereka hidup secara baik di lingkungannya tetap dengan perbedaan yang ada. (lihat tabel 2, hlm. 58)

³² *Kroniek Stads Gemeente Malang 1914-1939*, *op. cit.*, hlm., I. Pemukiman Eropa ini berada dibagian Barat daya Alun-alun.

³³ *Ibid.*

Tabel 2
Wilayah Pemukiman dan Jumlah Penduduk

Wilayah	Eropa	Pribumi	China	Timur Asing	Total
Kidulpasar (Pemukiman China)	644	6827	3743	705	11919
Oro-oro Dowo	2535	9011	351	20	11917
Kauman (Kampung kota)	1172	9846	464	186	11668
Klojen	1779	7892	302	24	9997
Bareng	360	6394	1085	31	6741
Claket (Pemukiman Eropa)	1513	4407	61	0	5981
Lowokwaru	586	4313	81	15	4995
Jodipan	198	3818	873	48	4937

Sumber: *Stadsgemeente Malang 1938*

Pola pemukiman kota Malang sendiri sebelum tahun 1914 memang direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Pusat kota kemudian bertambah dengan bangunan-bangunan baru dengan model kolonial, terutama dengan gedung-gedung pemerintah dan tempat tinggal para pejabat baik pribumi maupun pejabat kolonial.³⁴

Pada mulanya bentuk kota Malang dengan Alun-alun dipusat kota merupakan sebuah ciri khas tradisional yang indah tetapi sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat maka keindahan tersebut berubah menjadi sangat buruk.³⁵ Hal utama yang paling dominan dari

³⁴ *Ibid*, hlm., 196.

³⁵ Dari data yang ada, pesatnya jumlah penduduk Malang merupakan faktor dari kerumitan masalah pemukiman. Pertambahan tersebut dapat di lihat dari daftar statistik penduduk,

ketidakberaturanannya bangunan-bangunan itu adalah dari faktor penambahan penduduk dan kurangnya lahan.³⁶ Masalah pertumbuhan penduduk yang pesat dan faktor kebutuhan perumahan rakyat memaksa pihak pemerintah mencari solusi pemecahannya. Pada akhir tahun 1926, dewan kotapraja menganggarkan dana dari kas daerah sebesar f 34.500 juga dari pemerintah pusat yang juga merespons permintaan dana bagi pembangunan ini. Dana pinjaman yang diberikan sejumlah f 500.000 tertuang dalam *Bijlagen: Volkstraad* no. 2124 tahun 1928.³⁷ Dalam waktu yang sangat singkat setelah dana diperoleh, sebanyak 12 bangunan berhasil disewakan dengan harga f 35,- sebulan.³⁸ Pembangunan perumahan tersebut bisa dikatakan berhasil pada saat itu, jika dilihat dari tenggang waktu penjualan yang tidak terlalu lama setelah rumah-rumah tersebut selesai

dimana pada tahun 1890 total jumlah penduduk masih berada pada angka 12.040 jiwa. Lihat A. Van Schaik, *op. cit.*, hlm., 29. (lihat tabel 1)

³⁶ Data yang menyorot tentang eksploitasi tanah pada tahun 1925-1928 akibat tingginya permintaan lahan baik itu untuk industri maupun perumahan dan perdagangan membawa dampak negatif bagi persebaran pembangunan yang kurang memiliki etika dan estetika lingkungan. Bangunan rumah warga asing yang sering kali menggunakan batu dan batu bata adalah hal yang tidak sehat, kotor dan rawan banjir karena mereka melupakan faktor penyerapan air secara alami dari tumbuhan. Rumah-rumah yang di bangun pun memiliki jarak yang minimal. Model perkotaan ini menjadi rawan wabah sampar. Dalam Anthony Reid, *Dari Ekspansi Hingga Krisis II, Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680* (Jakarta: Obor Asia, 1999), hlm., 117. Juga Yulianto Sumalyo, *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 39 bahwa kondisi perumahan di Indonesia berada pada kondisi yang sangat buruk, terutama terhadap sistem pencahayaan dan penghawaan.

³⁷ *Bijlagen: Volkstraad* no. 2124 tertanggal 27 September 1928.

³⁸ *Kroniek Stads Gemeente Malang 1914-1939, op. cit.* hlm., LXXVI. Dalam Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa*. (Yogyakarta: Benteng. 2000), hlm., 226 Harga sewa pada perumahan rakyat yang diusahakan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan pihak swasta menetapkan harga untuk sebuah rumah kecil dibawah f 100 sebulan tidak akan menguntungkan pihak developer. Mengenai jumlah bangunan rumah rakyat yang diusahakan pemerintah (lihat tabel 3)

dibangun. Implikasi yang termuat didalamnya adalah kesejahteraan masyarakat dapat dinilai cukup.³⁹

Tabel 3
Data Pemukiman dan Nilai Sewa

Jumlah	Tempat	Nilai Sewa	Total Sewa
4	Ardjoenowardstraat	f 40	f 160
4		f 35	f 140
4		f 30	f 120
2	Kawistraat	f 50	f 100
1		f 40	f 40
7	Ardjoenostraat	f 70	f 490

Sumber: *Stadsgemeente Malang 1938*

Perkembangan dan perluasan kota biasanya berdampak pada kurangnya rumah bagi tempat tinggal penduduk. Upaya pengadaan rumah-rumah rakyat terus berlanjut, namun dalam pelaksanaannya, pemerintah dihadapkan pada sulitnya pembagian tanah. Pihak-pihak swasta yang diajak bekerja sama mewujudkan tercapainya pemenuhan kebutuhan perumahan hanya mengejar target keuntungan bagi pihaknya sendiri. Oleh karena itu pada tahun 1928 Walikota H.I. Bussemaker

³⁹ Namun kenyataan dilapangan menggambarkan fakta yang berlainan. Sejumlah data pada tahun 1938 terdapat 242 perkara dalam daftar pendirian rumah semi permanen, 175 diantaranya termasuk kasus baru. semi permanen yang dimaksud disini adalah rumah yang dibangun tanpa menggunakan pondasi yang kuat sebagaimana rumah permanen. Dinding-dinding rumah ini terbuat dari gedek dan kerangkanya dari bambu. *Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.*, hlm., 45.

meminta pemerintah pusat untuk membuat tatanan yang jelas tentang pembagian tanah.⁴⁰

Ada lima macam tipe rumah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Malang terhadap jenis-jenis bangunan yang ada di wilayah ini. Klasifikasi dilaksanakan untuk melakukan stratifikasi masyarakat berdasarkan status sosialnya. Jika masyarakat yang hanya memiliki rumah dalam kategori semi permanen I (satu) maka rumah tersebut hanyalah sebuah kerangka bambu yang disusun dan direkatkan dengan gedek atau lembaran-lembaran bambu yang dianyam tanpa menggunakan fondasi dari campuran batu dan pasir.⁴¹ Kategori-kategori rumah lainnya adalah: kategori II (dua): rumah berfondasi, kerangka atap rumah menggunakan kayu dan sedikit bambu. Kategori III (tiga): bagian atap bangunan juga menggunakan kayu, berfondasi dan bagian dinding menggunakan campuran batu. Kategori IV (empat): Semua bagian bangunan menggunakan batu dan berfondasi kuat. Kategori V (lima): Tipe bangunan ini dikerjakan oleh seorang ahli bangunan, digunakannya batu dan besi pada keseluruhan bangunan yang berfondasi kuat. Disamping itu wilayah pemukiman elit yang biasanya hanya dimiliki oleh golongan kelas atas baik pribumi, Eropa, maupun Timur Asing yang biasa disebut dengan Villa masuk dalam kategori ke-5 dari tipe-tipe tersebut. Kawasan ini biasanya terletak sedikit ke arah luar pusat kota, misalnya antara jalan

⁴⁰ *Kroniek Stadsgemeente Malang 1914-1930, op. cit., hlm., XCII.* Pemerintah mengeluarkan keputusannya dalam *Bijblad* no. 11272 tahun 1926 mengenai penguasaan tanah untuk perluasan kota dan aturan-aturan tertentu sebagai pembatas agar tidak terjadi spekulasi tanah besar-besaran.

⁴¹ *Stadsgemeente Malang 1938, op. cit., hlm., 43.*

Buring dan jalan Welirang yang berbatasan dengan jalan Merapi disebelah Barat dan Ijen *Boulevard* di sebelah Timur. Bangunan-bangunan ini tidak semua baik, banyak diantaranya melanggar ketentuan dewan kota. Pelanggaran ini berkaitan dengan penentuan harga sewa dan perselisihan antara pihak kontraktor dengan pemerintah.⁴² Villa-villa yang terdapat didalam kota yang bersengketa dengan pemerintah menempati wilayah sebesar ± 9 hektar.⁴³ Menurut data mereka inilah golongan masyarakat yang merongrong pemerintah disektor pajak.

a. Fasilitas Air Bersih dan Listrik

Saluran air bersih untuk dikonsumsi penduduk pertama yang selesai dibuat di kota Malang sekitar tahun 1915 dengan menempatkan sejumlah pipa-pipa yang menyalurkan air dari sumber mata air hingga sampai ke pemukiman penduduk dan wilayah-wilayah strategis pada waktu itu. Saluran air ini dipasang secara serampangan tanpa memperhitungkan penambahan penduduk dan perluasan pemukiman sebagai dampaknya kelak dikemudian hari. Pemasangan saluran air awal inilah yang mengalami banyak kerusakan menjelang tahun-tahun 1930-an akibat kurangnya perhitungan pihak penyelenggara atau yang mengerjakan bukan berasal dari tenaga ahli atau teknisi pada waktu itu.⁴⁴ Perkembangan kota setelah tahun 1915 sudah sangat luas hingga saluran air yang pertama kali diselesaikan itu

⁴² *Kroniek Stadsgemeente Malang 1914-1939, op. cit., hlm., XCIV-XCV*

⁴³ Sengketa ini terjadi pada tahun 1930. Tidak jelas lokasi yang disebut-sebut mencapai luas 9 hektar tersebut. Bisa jadi lokasi itu berpencar-pencar (tidak pada satu lokasi) yang masih terdapat didalam kota.

⁴⁴ Dewan Pemerintahan Daerah Kota Malang, *Laporan Tahun 1951 Kota Besar Malang* t.th., Malang: Dewan Pemerintahan Daerah, hlm. 153-154.

kurang mencukupi pasokan sejumlah pemukiman dan tempat-tempat vital lainnya. Hampir bisa dipastikan bahwa pasokan air bersih hanya terfokus bagi kalangan berada atau kelas atas, sedangkan warga pribumi biasa kurang mendapatkan perhatian. Tahun-tahun awal pembukaan saluran ini merupakan masa-masa sulit bagi pemerintah untuk menentukan tarif pembayaran pelanggan.⁴⁵ Apalagi faktor prasarana yang kurang memenuhi standar dan kondisi permukaan tanah yang kurang menguntungkan. Malang adalah kota yang berada diketinggian 1500 kaki dari permukaan air laut, hal ini menunjukkan topografi wilayah yang berada didaerah perbukitan. Kelandaian tanah pada masing-masing wilayah tidak sama dan sering tidak rata. Kasus ini mengakibatkan pipa-pipa yang telah ditanam mengalami kesulitan mentransfer debit air yang sangat kurang kerumah-rumah penduduk ditempat yang lebih tinggi atau medannya sedikit naik. Perlu diketahui bahwa saat itu tempat penampungan air bersih dari tiga daerah induk belum dilengkapi dengan alat tertentu supaya keadaan pipa selalu bersih tanpa hambatan.⁴⁶ Belum lagi bagian-bagian pada sambungan pipa ditempat yang berkelok atau membelok, banyak ditemukan kebocoran-kebocoran ditempat-tempat seperti itu. Pemerintah sempat merugi sebesar f 24.000 dan pendapatan

⁴⁵ *Kroniek Stads Gemeente Malang 1914-1939, op. cit., hlm. XIV*

⁴⁶ Dewan Pemerintahan Daerah Kota Malang, *Laporan Tahun 1951 ...*, *loc. cit.* Hambatan yang dimaksud adalah tersumbatnya aliran air dalam pipa oleh kerikil-kerikil yang terbawa oleh air, oleh karena itu debit air yang seharusnya normal menjadi berkurang sampai ketempat-tempat pemukiman atau fasilitas umum kota.

dari kantor-kantor swasta terhadap tagihan rekening air tidak dapat menutup angka kerugian tersebut.⁴⁷

Pengadaan air bersih untuk dikonsumsi masyarakat mulai diperluas jaringannya hingga ke pelosok kota. Pengadaan saluran ini kembali dilaksanakan secara maraton tahun 1919 dengan menggunakan uang dari hasil subsidi sebagai dana awal perbaikan dan penambahan saluran.⁴⁸ Pemerintah kota mulai memikirkan pemenuhan air bersih ke setiap pelosok kota hingga masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan air bersih. Namun, pembangunan ini mengalami masa pasang dan surut, kadang-kadang investor asing atau swasta yang diajak kerjasama oleh pemerintah tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati. Mereka terkesan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, karena ulah dari para pembesar ini, masyarakatlah yang menjadi korban. Keluhan tiadanya pasokan air bersih, sistem pembuangan jelek dan lain-lain ternyata masih banyak dilontarkan masyarakat terutama mereka yang menempati wilayah perumahan non elite.⁴⁹

Pasokan air di kota Malang berasal dari tiga pusat penampungan, yaitu Cindi-Kemadu, Karanganyar dan Rewut Binangun.⁵⁰ Pemeliharaan sumber air atau kolam penampungan air untuk pasokan kota Malang diatur secara periodik. Lokasi penampungan Rewut Binangun yang berada satu kompleks dengan kolam

⁴⁷ *Kroniek Stadsgemeente Malang 1914-1939, loc. cit.*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. XL

⁴⁹ *Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.*, hlm. 45.

⁵⁰ *Kroniek Stadsgemeente Malang 1914-1939, op. cit.*, hlm. CXXX.

induk Sumbersari memiliki debit air masing-masing 150 L/det pada musim hujan. Pada musim kemarau jumlah debit air menjadi sangat berkurang, 50 L/det dari Binangun dan 44 L/det dari Sumbersari yang dialirkan ke kota. Lain halnya dengan penampungan air di karangan, kapasitas yang dapat dialirkan ke kota dari lokasi ini justru lebih rendah dari pada kapasitas kompleks sebelumnya yaitu berkisar 36 L/det-53 L/det.⁵¹ Kapasitas yang kecil ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan air di sekitar Karanganyar saja.

Tarif yang dibebankan kepada masyarakat atas penggunaan air bersih ini tergolong sangat mahal bagi golongan rendah. Perhitungan tarif disesuaikan dengan debit air yang digunakan dalam setiap satu bulan pemakaian, semakin banyak air yang digunakan semakin murah perhitungan biaya yang dikenakan per meter kubik bila kapasitas air melebihi batas pemakaian. Perhitungan tersebut meliputi uang sewa tetap (*albonemen*), biaya pemakaian dan tarif atas kelebihan pemakaian. Biaya sewa $f 1 - f 10$ dikenakan pada pemakaian debit air sebanyak 5 meter kubik yang mana biaya pemakaiannya sebesar $f 1$, sedangkan kelebihan pemakaian dikenakan $f 0,22'5$. Namun lain halnya bila pemakaian mencapai 28 meter kubik, biaya kelebihan per meter kubik hanya sekitar $f 0,20$ dengan tarif sebesar $f 7$ dan biaya tetapnya sebesar $f 71 - f 80$.⁵² Sungguh suatu biaya yang sangat besar yang harus dikeluarkan warga kota terhadap kebutuhan air bersih dalam setiap bulannya. Itulah mengapa pemerintah seakan-akan tidak

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Kroniek Stadsgemeente Malang 1914-1939, op. cit., hlm.CLXXXVI.*

memperhitungkan nasib masyarakat kebanyakan yang sangat berat menanggung beban kebutuhan hidupnya.

Di kota Malang, fasilitas perkotaan yang juga telah tersedia adalah saluran listrik. Perusahaan listrik negara (*Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteits Maatschappij*) ini berdiri tahun 1914. Pasokan listrik untuk kota pada tahun 1919 masih sekitar 345 KW, tahun 1929 sudah mencapai 1428 KW. Saluran listrik di kawasan kota mencapai 1308 sampai 9619 berasal dari pusat pembangkit listrik tenaga air di Mendalan. Energi yang dihasilkan mencapai 1,2 juta KW sampai kisaran 5,4 juta KW.⁵³

Saluran listrik perkotaan mengutamakan proyek pemerintah untuk penerangan jalan, sedangkan saluran bagi rumah tangga individual masih beberapa saja. Perusahaan listrik pemerintah kota Malang menyalurkan energi listrik bagi penerangan jalan sebesar 40 Watt lampu-lampu dipasang untuk jalan-jalan raya atau jalan utama. Sedangkan untuk jalan-jalan kecil dan jalan-jalan kampung digunakan lampu dengan daya 15-25 Watt.⁵⁴ Kebijakan ini dilakukan agar pemerataan terhadap kebutuhan aliran listrik bisa dilakukan merata kepada masyarakat. Proyek-proyek penyaluran dilakukan setahap demi setahap, hal paling mendasar yang menghambat adalah tersedianya material untuk saluran listrik yang masih kurang. Pada akhir tahun 1938 penghitungan yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap jumlah daya dari lampu-lampu yang digunakan di daerahnya adalah sebanyak kurang lebih 536 lampu berdaya 40 Watt. Hasil

⁵³ *Ibid*, hlm. CVI.

⁵⁴ *Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.*, hlm. 50.

terbanyak diperoleh dari penggunaan lampu dengan kekuatan 25 Watt yaitu berjumlah 1070 buah lampu. Pemasangan lampu-lampu besar biasanya dilakukan oleh daerah-daerah perdagangan misalnya di sepanjang Jalan Semeru-Kayutangan dan Alun-alun Kidul juga untuk penerangan hotel Palace.⁵⁵

b. Sanitasi

Fasilitas yang baik dari sebuah pemukiman biasanya tersedia dikawasan elite, jalan-jalan yang rata dengan aspal, saluran air bersih, listrik dan pembuangan akhir yang juga tersedia. Pemenuhan bermacam-macam fasilitas tersebut ternyata tidak seluruhnya berfungsi dengan baik, berbagai pelanggaran di kawasan elite ini tidak jarang bisa ditemui dan dinas pemukiman terkesan acuh saja.⁵⁶ Apalagi fasilitas bagi perumahan rakyat, bukan hal asing jika kondisi paling memprihatinkan banyak terjadi akibat kelalaian-kelalaian tersebut di kawasan ini.

Pembangunan perumahan rakyat dan atau penataan lokasi bagi wilayah pemukiman yang diusahakan oleh pemerintah memang tidak selamanya memenuhi kualifikasi atas fasilitas yang seharusnya sudah tersedia. Contoh kasus yang sedang dialami masyarakat Malang tahun 1937 dari total 20.077 rumah dari beberapa wilayah pemukiman hanya sekitar 43,5 % atau kurang dari setengahnya yang mendapat aliran listrik. 2,73 % tidak mendapatkan air bersih karena belum

⁵⁵ *Ibid.* Total lampu yang ada dikota Malang pada tahun 1938 adalah 1686, jika dsatukan maka kekuatan dayanya sebesar ± 53.820 Watt. Penerangan tersebut telah menerangi sepanjang ± 57 Kilometer jalan-jalan utama dan ± 19 Kilometer jalan-jalan kecil termasuk jalan kampung.

⁵⁶ *Kroniek Stadsgemeente Malang 1914-1939, op. cit., hlm. XL.*

tersedianya saluran air.⁵⁷ Padahal sejak dinyatakan berpisah dari Pasuruan, dan atas restu pemerintah Pasuruan, semua aspek yang berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk kotapraja Malang yang semula ditangani oleh Pasuruan dilimpahkan pada dewan kota Malang. Berdasarkan *Bijlagen: Adviseur voor Decentralisatie* yang menerangkan bahwa air bersih dan aliran listrik ditangani oleh pemerintah kota secara mandiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan wilayah Pasuruan lagi.⁵⁸ Artinya bagaimana dan kemana air bersih juga aliran listrik disalurkan adalah tanggungjawab pemerintah, namun tidak bisa dipersalahkan jika faktor keterbatasan menjadi kendala utama kedua sarana itu tidak dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat. Sering kali pemerintah mengadakan pembangunan yang bersifat perbaikan-perbaikan, sebagai contoh setiap kampung dibuatkan saluran pembuangan, perbaikan jalan, dan rencana penggantian atap rumah dengan genting serentak di seluruh kota Malang dan Karesidenannya.⁵⁹

Selama tahun 1926 pemerintah kota Malang menyelesaikan saluran air yang nantinya diteruskan melewati sungai Brantas sebelah kanan. Saluran tersebut akan difungsikan sebagai saluran pembuangan oleh daerah-daerah yang berada di

⁵⁷ *Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.*, hlm. 45.

⁵⁸ *Bijlagen: Adviseur voor Decentralisatie* no. 227/A tertanggal 28 Februari 1914. Pemerintah kolonial juga menyediakan dana bagi perawatan terhadap saluran got, dan riul serta menaikkan dana untuk pembiayaan penerangan jalan.

⁵⁹ ANRI, *Memori Serah Jabatan 1921-1930: Jawa Timur dan Tanah Kerajaan* "Residen Pasuruan bulan Agustus 1924" (Mailrap. No. 3375/24) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia-Jakarta, 1978), hlm. 69. Biaya-biaya tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan cara kredit kepada pemerintah. Mereka mengangsur sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Oro-oro Dowo dan sebelah Barat sepanjang Kayutangan.⁶⁰ Saluran pembuangan dalam kampung di daerah Lowokwaru dan Claket juga direalisasikan dengan total pembiayaan sebesar f 20.000 pada tahun 1930.⁶¹ Adanya sanitasi yang baik di kawasan padat penduduk diharapkan dapat mencegah secara dini penyakit yang disebabkan oleh jentik-jentik nyamuk demam berdarah atau berbagai dampak atas buruknya sanitasi tersebut.

3. Pasar

Malang sebagai *gemeente* atau kotapraja dengan kewenangan mengatur rumah tangga sendiri, memang sangat sulit menetapkan strategi awal bagi kemajuan ekonomi perkotaan. Apalagi sejak awal, Malang berada dibawah pengawasan karesidenan Pasuruan, dimana segala kebutuhan dan permasalahan merupakan tanggung jawab ibukota karesidenan yakni Pasuruan. Penataan administrasi dan segala ketentuan-ketentuan yang mulai diberlakukan didalam pemerintahan kotapraja Malang telah termuat dalam berkas-berkas pemerintah pusat yang diturunkan bagi kota yang bersangkutan. Salah satu contoh adalah pengaturan tentang pendirian pasar. *Staatsblad van Nederlands Indië* tahun 1914 nomer 197.⁶² Peraturan pembukaan pasar baru ini sebelumnya diatur dalam *Bijlagen: Decentralisatie Adviseur* no. 227 A tertanggal 28 Februari 1914 yang berkaitan dengan hutang dewan kota Malang kepada Gubernur Jenderal Hindia

⁶⁰ *Kroniek Stadsgemeente Malang 1914-1939, op. cit.*, hlm. LXX. Untuk pekerjaan ini pemerintah mengeluarkan biaya sebesar f 155.000

⁶¹ *Ibid*, hlm. C

⁶² *Staatsblad van Nederlands Indië* tahun 1914 nomer 197 pasal 5, ayat 1 bagian a.

Belanda. Jumlah pinjaman wilayah ini sebesar f 550.000 dan f 150.000 diantaranya digunakan untuk pembangunan pasar baru.⁶³

Gambaran global tentang pasar adalah sebuah tempat yang dipenuhi dengan barang-barang dagangan dan adanya interaksi antara penjual dengan pembeli dalam satu waktu tertentu. Keberadaan pasar di wilayah perkotaan memiliki arti penting, wilayah pemukiman tertentu membutuhkan pasar sebagai tempat yang melayani kebutuhan bahan-bahan makanan maupun perlengkapan rumah tangga sehari-hari.⁶⁴ Pasar di kota Malang yang sudah diketahui aktifitasnya sebelum tahun 1914 adalah pasar Pecinan. Pasar ini merupakan pasar swasta yang dikelola oleh warga Cina. Sesaat setelah *Gemeenteraad* terbentuk, keputusan untuk mendirikan sebuah pasar baru yang terletak di *Maetsuucker Straat* atau persimpangan antara *Speelman Straat* dan *Van Oudt Hoorn Straat* tepat disebelah Barat Alun-alun Bunder (*J.P. Coen Plain*) segera dilaksanakan.⁶⁵ Namun, pertentangan dan penolakan sempat dilontarkan golongan Cina dan Arab yang selama ini mengelola dan menempati pasar Pecinan. Mereka bahkan siap mengeluarkan dana sebesar f 20.000 agar pemerintah mengurungkan niat membangun pasar di *Maetsuucker Straat*. Perselisihan pun tak terelakkan, pemerintah menolak menerima bantuan dana melainkan meminta golongan-

⁶³ *Bijlagen: Adviseur voor Decentralisatie* no. 227 A. Tertanggal 28 Februari 1914, *loc. cit.*

⁶⁴ A. Bagoes P. Wiryomartono, *Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 13

⁶⁵ Dewan Pemerintahan Daerah, *Empat Puluh...*, *op. cit.*, hlm. 48

golongan niagawan memberikan tanahnya bagi perluasan pasar dan pemukiman di daerah itu. Kesepakatan telah di dapat dan pemerintah kemudian menguasai pasar Pecinan.⁶⁶ Pasar Pecinan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah tahun 1919 dan diadakan perbaikan-perbaikan komplek pasar hingga tahun 1924 telah menghabiskan biaya f 547.755,48 meningkat sebesar 265 % dari dana awal yang disediakan sebesar f 150.000.⁶⁷

Pasar selanjutnya dibangun di kawasan Klojen atau yang disebut dengan pasar Klojen pada tahun 1919 tepatnya di *Sophiastraat*. Tidak tampak perubahan, masih dengan delapan toko-toko kecil yang tampak dari depan dan ada lima gudang-gudang kuno yang menggunakan kayu sebagai kerangkanya. Sekitar tahun 1932-1934 berdiri pasar-pasar kecil di Kebalen, sekitar tahun 1938 pasar yang berada di Kebalen ini masih memiliki dua gudang dan rumah tinggal yang sangat tua. Rumah tersebut dulunya disewakan, dan digunakan oleh sebuah toko bernama *Annex*. Masih banyak pasar-pasar lain yang terdapat di Oro-oro Dowo, Lowokwaru, jalan Sawahan, dan sebagainya menyebar disetiap penjuru pemukiman.⁶⁸

Pada setiap bangunan pasar, bangunan yang selalu ada atau yang sering ditemukan disekitarnya adalah gudang. Gudang-gudang ini berfungsi sebagai

⁶⁶*Kroniek Stads Gemeente Malang 1914-1939, op. cit., hlm. XIII-XIV*

⁶⁷*Ibid.* Dasar peraturan bagi jumlah pinjaman sebesar f150.000 lihat *Bijlagen: Adviseur voor Decentralisatie* no. 227 A. Tertanggal 28 Februari 1914, *loc. cit.*, dan *Stadsblad van Nederlands Indië* tahun 1914 nomer 297 pasal 5, ayat 1 bagian a.

⁶⁸ Dewan Pemerintahan Daerah, *Empat Puluh...*, *op. cit.*, hlm. 49. lihat juga *Stads Gemeente Malang 1938*, hlm. 151

tempat penyimpanan barang-barang para pedagang. Saat itu, pasar merupakan sebuah lembaga yang dikelola oleh pemerintah, pedagang yang menempati areal pasar wajib membayar retribusi dan mentaati peraturan dari pemerintah. Dimana peraturan-peraturan tersebut ditetapkan dalam sebuah *Gemeenteblad*.⁶⁹

4. Jaringan Transportasi

Pembangunan jaringan transportasi di wilayah Hindia Belanda sudah dimulai ketika Daendels mewujudkan jalan raya pos (*Groote Postweg*) tahun 1808 di sepanjang pesisir pantai utara Jawa atau dari Anyer sampai Panarukan. Perhubungan darat ini memang pada awal pemikirannya dibangun bagi kepentingan militer, dan lambat laun fasilitas ini juga digunakan untuk mempermudah arus ekonomi utamanya perdagangan. Keberadaan jalan ini, bisa dikatakan sebagai jalur atau jalan induk, karena berawal dari sinilah kemudian mulai terjalin jalan-jalan kecil menuju daerah pedalaman.⁷⁰

Pengembangan pembangunan jalan di kota Malang seperti halnya diutarakan oleh Karsten adalah:

Harus diadakan perbedaan yang jelas antara jalan-jalan utama dan jalan pembagi, dalam arus aliran lalu lintas. Jalan-jalan utama tersebut harus mempunyai hubungan yang lancar dan baik antara satu dengan lainnya. Jumlah jalan utama perlu dibatasi hingga seperlunya saja. Jarak antara satu dengan lainnya sekitar 400-800 M dan semakin keluar kota jaraknya boleh lebih besar. Jalan-jalan utama itu merupakan kerangka lalu lintas kota. Dari cara membedakan jalan utama dan pembagi inilah baru kemudian ditentukan hal-hal lainnya. Jalan-jalan tidak sekedar hanya memenuhi persyaratan material, tapi

⁶⁹ Baca *Kroniek Stadsgemeente Malang 1914-1939, op. cit.*

⁷⁰ Nasution, "Perkembangan Ekonomi Karesidenan Surabaya 1830-1930", Tesis tidak diterbitkan pada Program Studi Ilmu Sejarah-Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora Universitas Gadjah Mada, 1998, hlm., 152.

juga harus menjadi tuntutan keindahan kota itu terutama bisa dinikmati dari sudut kota. Jalan-jalan itu harus berirama, diatur dengan sumbu jalan dan harus diberikan titik-titik klimaks dan sebagainya.⁷¹

Pengaturan sejak dini jalan-jalan sebagai sarana transportasi darat di kota Malang pada saat itu bisa dilihat sebagai sebuah pemikiran yang sangat baik. Masing-masing jalur dihubungkan dengan pusat kota sehingga memudahkan arus barang dan jasa. Jalan utama ini kemudian memiliki banyak cabang yang menghubungkan antar wilayah-wilayah pemukiman yang tersebar luas disetiap penjuru kota dengan tempat-tempat umum, begitu pula sebaliknya. Pembangunan jalan di kota Malang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ibarat pembuluh darah yang mengalir kesetiap penjuru.⁷²

Perbaikan dan perluasan jalan secara umum dilaksanakan berdasarkan kebutuhan. Perluasan dan perbaikan ini sangat diperlukan mengingat sampai pada tahun 1938 luas jalan di kota Malang yang belum diaspal (*grindwegen*) mencapai 35.760 meter persegi. *De Grindwegen* yang disebut itu antara lain berada di sepanjang jalan Salak, jalan *Ophir* (*Ophirweg*), jalan *Beatrix* (*Beatrixweg*) dan jalan Prahul luas atau panjang jalan-jalan tersebut berkisar 7.710 meter persegi. Sedangkan jalan yang menunggu giliran diaspal adalah jalan Kawi sepanjang 1.040 meter persegi dan perluasan terjadi di jalan Pandhu 1230 meter persegi.

⁷¹ Handinoto, "Studi tentang Kota Malang...", *op. cit.*, hlm., 10.

⁷² Handinoto, *Perkembangan kota dan Arsitektur...*, *op. cit.*, hlm. 132.

Jalan Betek di sebelah Utara kali Sukun sepanjang 310 meter persegi dan jalan Oro-Oro Dowo di sebelah Selatan kali Sukun.⁷³

Selain jalur darat berupa jalan-jalan beraspal, bidang transportasi juga memiliki sarana lain berupa jalur kereta api. Pembangunan tahap pertama jalan kereta api ini dimulai dari Surabaya sekitar tahun 1875. Perusahaan kereta api negara *Staatsspoorweg* (SS) untuk yang pertama kalinya mengerjakan jalur antara Surabaya - Pasuruan dan Pasuruan - Malang.⁷⁴ Jalur Pasuruan-Malang ini sebenarnya dipecah dalam tiga tahapan antara lain; jalur Bangil-Sengon, Sengon-Lawang dan yang terakhir jalur Lawang-Malang. Rel kereta sepanjang 112 Km ini memakan biaya keseluruhan sebesar f 9,5 juta.⁷⁵ Perkembangan ini kemudian memicu gerak ekonomi diantara ketiga daerah, baik Malang-Pasuruan, Pasuruan-Surabaya maupun Surabaya-Malang. Apalagi pada waktu itu sektor-sektor pertanian mengalami masa kejayaannya. Keadaan semakin berkembang setelah muncul perusahaan kereta api swasta yaitu *Malangsche Stoomtram Maatschappij*. Perusahaan ini memiliki kontribusi yang besar bagi perkembangan transportasi kota Malang. Jalur kota yang menjadi bidikan investor ini dikerjakan mulai tahun 1914-1915, maka terealisasi jalur kereta api kota pertama. Daerah yang

⁷³ *Stadsgemeente Malang 1938*, Hlm. 30.

⁷⁴ Nasution, *op. cit.*, hlm. 152-153.

⁷⁵ Tim Telaga Bakti Nusantara dan APKA (Asosiasi Perkeretaapian Indonesia), *Sejarah Perkeretaapian Indonesia*, jilid 1 (Bandung: Angkasa Bandung, t. thn.), hlm. 62.

menjadi jalur KA ini melewati Kayutangan dan Jagalan, sepanjang jalan Kotalama yang memanjang ke arah selatan, kira-kira sampai stasiun Kotalama.⁷⁶

Terhubungnya dengan baik jalan-jalan utama dengan jalan-jalan cabang hampir di seluruh kota menciptakan sebuah fenomena yang sangat menarik. Beraneka ragam transportasi darat bisa ditemui lalu lalang di sepanjang jalan-jalan baik jalan protokol maupun jalan-jalan cabang di seluruh kota Malang. Selain mobil (*auto*), ada juga mobil penarik (*kraanauto*) atau semacam truk, sepeda (*fietsen*), bahkan Cikar.⁷⁷ Mobil-mobil mulai lalu lalang di jalan-jalan kota Malang pada tahun 1930, data statistik menunjukkan sebanyak 900 buah mobil terdaftar di kantor pajak pemerintah kotamadya.⁷⁸ Mobil-mobil tersebut meliputi juga alat transportasi umum seperti taxi. Tahun 1935 bentuk taxi yang banyak dijumpai di Malang adalah semacam mobil Jeep besar, mereka menggunakan kawasan pasar sebelah selatan sebagai tempat mangkalnya karena belum ada stasiun atau terminal resmi yang dibangun pemerintah.⁷⁹

⁷⁶ *Kroniek Stadsgemeente Malang 1914-1939, op. cit.* hlm., XVI. Dan A. Van Schaik, *loc. cit.*, (32)

⁷⁷ *Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.*, hlm. 33

⁷⁸ "Aangeslagenen en Aanslag in De Personeele Belasting", *Indisch Verslag 1931: Statistische Jaar Overzicht van Het Nederlandsch-Indië Over Het Jaar 1930* (Batavia: Landsdrukkerij, 1931), (no. boks/no. berkas: 44/815), hlm. 176-177

⁷⁹ A. Van Schaik, *op. cit.*, hlm. 115. Pemerintah membangun terminal bis resmi tahun 1938 yang berlokasi di samping pasar (jalan Kidul Pasar) dengan total biaya f 5000. Terminal ini merupakan gabungan dari tempat mangkal taxi yang sudah lebih dahulu menempati areal yang sama. *Busstation* (Terminal Bis) ini mampu menampung 12 bis didalamnya dan ada kantor penjualan karcis ditengah-tengah los. Pemerintah menyewakan terminal ini seharga f 7.50 sebulan untuk satu bis. Sampai dengan tahun 1939 diketahui terdapat 46 bis dari 3 perusahaan yang berbeda. Lihat majalah *Local Techniek* 'Indisch Bouwkundig Tijdschrift: Technisch Orgaan van De Vereeniging U. Locale Belangen'. No. I, edisi Januari-Februari 1939, hlm. 4-5.

C. Lembaga Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana pembelajaran masyarakat dari masa ke masa. Awal sebuah eksistensi lembaga pendidikan di nusantara sebelum masuknya penetrasi asing sudah terlihat disetiap sudut wilayah negeri ini. Sistem pendidikan tradisional itu cenderung bersifat keagamaan. Istilah pondok pesantren dan padepokan berasal dari perkembangan sistem ini. Padepokan seperti yang biasa dikenal masyarakat Jawa adalah sebuah tempat dimana terdapat seorang guru yang memiliki ilmu tinggi dengan murid dari berbagai kalangan untuk menuntut ilmu. Pondok pesantren seperti yang diungkapkan oleh A.H. Johns dan C.C. Berg merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu dan Budha dimana istilah "santri" berasal dari kata *shastri* (bahasa Sanskerta) yang erat kaitannya dengan kata pesantren.⁸⁰ Kedatangan penetrasi asing, mulai dari Portugis sampai kolonial tidak menyurutkan dan menghilangnya tradisi pendidikan ini sepenuhnya. Hal ini terbukti pada perkembangan pendidikan keagamaan ini selanjutnya, pembatasan dari pihak pemerintah untuk menghindari terjadinya penggalangan kekuatan dari pihak pribumi akibat kuatnya dasar agama, tetap tidak menghapus keberadaannya.

Perkembangan pengajaran di kota Malang sangat bergantung pada sarana fisik sekolah. Sejak tahun 1914 berbagai upaya dilakukan untuk pembangunan sekolah-sekolah yang dibutuhkan di kota ini. Pemerintah menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan satu faktor bagi perubahan kondisi kota menuju

⁸⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyayi* (Jakarta: LP3ES, 1985) dalam Jalaluddin, *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 6. Pola pendidikan Islam yang terdapat di nusantara sangat mendominasi sistem pengajaran awal di negeri ini. Pondok pesantren adalah pranata pendidikan asli Islam yang lahir dari pola kehidupan *kasatraf*.

perkembangan yang lebih baik. Sekolah dasar Cina-Belanda (*Hollandsch-Chineesche School*) dan sekolah khusus wanita (*Meisjesschool*) juga setingkat sekolah dasar dibuka pada tahun 1914 di kota Malang. Ada tiga buah sekolah pribumi dan satu sekolah Cina yang diketahui telah beroperasi lebih lama.⁸¹ Lembaga-lembaga pendidikan yang diketahui berkembang di Malang tidak seluruhnya merupakan sekolah atas dukungan pemerintah, sebagian besar dari sekolah-sekolah itu didirikan atas prakarsa pihak-pihak swasta yang memiliki kepentingan di kota. Lembaga-lembaga keagamaan misalnya atau organisasi-organisasi kemasyarakatan lain yang meng-klaim diri sebagai pihak yang peduli pada tingkat kecerdasan masyarakat, saling bersaing membangun sekolah.

Pembedaan kewarganegaraan pada masa ini utamanya dibidang pendidikan masih terlihat jelas. Pendidikan bagi golongan pribumi yang masih sangat terbatas sekiranya masih tetap menjadi perhatian pemerintah. Salah satu contoh adalah keluarnya keputusan pemerintah untuk mengadakan pembelajaran bagi guru bantu dari golongan pribumi yang kelak dapat diandalkan sebagai pengajar di sekolah-sekolah dasar pribumi di kota Malang. Oleh karena itu pemerintah mendirikan *Normaal School*. Keputusan pemerintah membentuk sekolah pendidikan guru bantu pribumi ini berkaitan langsung dengan pengadaan pembiayaan. Setiap bulan pemerintah menanggung biaya sebesar f 190 per-sekolah untuk kepentingan penerangan dan pengawasan. Kewenangan tersebut seperti yang tercantum dalam surat keputusan pemerintah no. 2 tahun 1919

⁸¹ A Van Schaik, *op. cit.*, hlm. 25

menyebutkan, dana sebesar f 40 untuk penerangan sekolah dan f 150 untuk biaya pengawasan yang ditanggung pemerintah Hindia Belanda.⁸² Sedangkan untuk biaya penyelenggaraan sekolah ini pemerintah mencantumkan angka sebesar f 78,50 setiap bulan. Keputusan tersebut ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah tanggal 21 Oktober 1920 atas sepengetahuan Direktur Pendidikan dan Agama dan Direktur Keuangan⁸³

Tahun 1920-1924 pemerintah berencana mendirikan H.B.S (*Hogere Burger School*)- A.M.S (*Ambtenaren Middlebaar School*) di Malang, untuk itu pemerintah menghabiskan dana sebesar f100.000. Rencana penggabungan dua sekolah lanjutan ini dilakukan berdasarkan peraturan direktur Pendidikan dan Agama Jawa Timur tahun 1919. HBS diketahui keberadaannya sekitar tahun 1927 terletak dekat taman Coen atau Alun-alun Bunder dan AMS di daerah Lowok Waru.⁸⁴

Pada tahun 1935, sekolah Kelas Dua yang berada di Embong Brantas sudah tidak berada ditempat semula.⁸⁵ Tidak ada data yang menyebutkan tentang

⁸² *Besluit van Nederlandsche Indie*, nomor 2 tahun 1919 tertanggal 25 September 1919. Besarnya pembiayaan bagi pengawasan siswa disekolah guru bantu ini yaitu sebesar f 150 setiap bulan yang dinilai kurang efisien maka pemerintah menurunkan surat keputusan untuk mencabut keputusan tersebut. Lihat *Besluit van Nederlandsche Indie*, nomor 39 tahun 1922 tanggal 7 Juni 1922.

⁸³ *Besluit van Nederlandsche Indie*, nomor 21 tahun 1920 tertanggal 21 Oktober 1920.

⁸⁴ Rencana penggabungan sekolah HBS-AMS mengalami hambatan. Pada awalnya AMS di Jawa Timur tahun 1920 akan dihapuskan. Direktur Pendidikan dan Agama mengusulkan untuk menggabungkan AMS dengan HBS yang segera didirikan di Malang. Keputusan ini ditolak oleh Gubernur Jenderal di Jakarta dalam keputusannya tertanggal 1 Desember 1919. Dan keputusan terakhir menetapkan bahwa sekolah lanjutan ini berdiri sendiri-sendiri di tempat yang berbeda. *Kroniek Stads Gemeente Malang 1919-1924, op. cit.* hlm. XLIII-XLIV, LXXVIII

⁸⁵ *Stads Gemeente Malang 1938, op. cit.*, hlm. 67

perpindahan sekolah ini. Sampai dengan tahun 1938 di kota Malang terdapat 18 sekolah pemerintah yang dibuka bagi penduduk pribumi setingkat pendidikan rendah. Jumlah tersebut memiliki siswa sebanyak 2197 orang.⁸⁶ Sekolah-sekolah tersebut didirikan meluas hampir disetiap kawasan pemukiman. Sekolah-sekolah rendah yang didirikan oleh pemerintah kota atau *Gementelijke Inlandsche Lagere School* (G.I.L.S) sampai tahun 1938 antara lain:

1.	G.I.L.S. Kebalen Wetan: Volksschool	Kebalen Wetan
2.	“ Sawahan :	“ Sawahan
3.	“ I :	“ <i>Speelmanstraat</i>
4.	“ II :	“ Klojenlor
5.	“ III :	“ Temenggungan
6.	“ IV :	“ jalan Kawi
7.	“ V :	“ Mergan
8.	“ VI :	“ Bunul
9.	“ VII :	“ Mergosono
10.	“ VIII :	“ Utara Lowokwaru
11.	G.I.L. Meisjesschool :	Meisjesschool <i>Kloestraat</i>

Sumber: *Stadsgemeente Malang* 1938.

Selain sekolah dasar yang tersebut diatas, pendidikan yang berlaku di kota Malang pada saat kolonial Belanda berkuasa adalah sekolah lanjutan (*Vervolgschool*). Ada satu sekolah lanjutan kelas dua (*Inlandsche Tweede Klasse School*) atau sekolah lanjutan bagi golongan bumiputra. Sekolah lanjutan pribumi ini berada di Embong Brantas.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 81

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 69. Sedangkan sekolah lanjutan kelas satu antara lain:

1.	Vervolgschool I :	Vervolgschool <i>Speelmanstraat</i>
2.	“ II :	“ Klojenlor
3.	“ III :	“ Temenggungan
4.	“ IV :	“ jalan Kawi
5.	“ V :	“ Mergosono
6.	Meisjesvervolgschool :	Meisjesvervolgschool jalan Klojen

D. Pusat-Pusat Kesehatan

Jumlah penduduk yang memadati wilayah perkotaan semakin membawa dampak buruk, baik bagi wajah kota yang semakin tidak teratur, demikian juga bagi kesehatan lingkungan yang mulai ditepiskan. Padatnya bangunan-bangunan rumah penduduk, kawasan industri dan lingkungannya tanpa memperhatikan lagi saluran-saluran sanitasi dan saluran air, masalah-masalah tersebut adalah awal investasi dari segala musibah. Banjir datang saat musim penghujan, karena pembangunan-pembangunan tidak lagi mengelola saluran air atau got. Penyakit bermunculan dan menjadi endemi di berbagai wilayah. Tingkat penderitaan ini semakin panjang mengingat satu-satunya rumah sakit pertama yang terdapat di kota Malang pada masa-masa awal adalah rumah sakit militer dan kelak bernama rumah sakit Umum Claket.

Beberapa saat setelah Malang mengalami musibah serangan wabah pes yang sangat dahsyat pada tahun 1911 hampir di seluruh wilayah Malang, membuat pemerintah memikirkan untuk memperluas rumah sakit-rumah sakit dibawah kewenangan kotapraja.⁸⁸ Beragam rumah sakit berdiri di setiap penjuru kota. Terdapat empat rumah sakit yang dikenal di kota Malang antara lain: Rumah sakit Sukun atau *Zendingziekenhuis "Soekoen"*, *Lavalette Kliniek*, rumah sakit RKZ (*Roomsche Katholik Ziekenhuis*) *St. Magdalena Postel*, dan *Vereeniging Wijkverpleging*. Rumah sakit yang terakhir disebutkan adalah sebuah tempat mirip

⁸⁸ M.A. Hanafiah, Bander Djohan, Soerono, *125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia 1951-1976* (Jakarta: Panitia Peringatan 125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia, 1976), hlm. 11.

dengan klinik yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.⁸⁹ Tentu saja rumah sakit Militer tetap menjadi salah satu rujukan, selain memiliki 195 *bed* atau tempat tidur rumah sakit ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Sebelum dibuka bermacam-macam rumah sakit, rumah sakit Militer inilah yang pertama kali berdiri di kota Malang.

Tahun 1918 oleh prakarsa orang-orang 'berada' dalam arti materi mengusahakan berdirinya Klinik *Lavalette*. Mereka berasal dari golongan masyarakat perkebunan yang ingin memiliki sebuah lembaga kesehatan bagi para anggotanya. Klinik yang berada di daerah Rampal ini mengalami berbagai kerusakan setelah beroperasi sekitar kurang dari 8 tahun akibat kurang perawatan. Tahun 1926 ketika walikota memberikan subsidi bagi perbaikannya maka *Lavalette* bisa beroperasi baik dengan 25 *bed* atau tempat tidur.⁹⁰ Pemerintah memberikan subsidi sebesar f 1.600 pertahun. Subsidi ini diserahkan walikota Bussemaker dengan syarat bahwa akan disediakan 10 *bed* oleh *Lavalette* bagi penduduk Eropa yang tidak mampu.⁹¹ Sebagai lembaga kesehatan milik golongan berkebangsaan Eropa, *Lavalette* berkembang secara Eropa juga. Tahun 1929

⁸⁹ *Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.*, hlm. 63. Secara berurutan, jumlah tempat tidur yang tersedia pada masing-masing rumah sakit sampai pada akhir tahun 1938 adalah: 560; 56; 55; dan 6 tempat tidur. Penyebutan RKZ bagi rumah sakit Katholik (*Roomsche Katholik Ziekenhuis*) sudah tidak asing lagi. Masyarakat setempat pun memilih hanya menyebut RKZ tanpa disertai nama belakang yang menyertai rumah sakit tersebut. misalnya di Malang, RKZ *St. Magdalena Postel* atau RKZ yang berada di Surabaya yang bernama *St. Vincentius A Paulo*. Nama-nama yang digunakan hampir semua rumah sakit Katholik di Indonesia adalah nama-nama para imam tertinggi pada masa-masa awal. Baca JVS. Tondowidjojo CM. *St. Vincentius De Paul Terhadap Kaum Miskin* (Surabaya: t.penerbit, 1984); B.J. Boddeke, O.F.M.Cap. t.thn. *Medisch Missiewerk in Indonesië*. Djakarta: Kantor Misi Pusat.

⁹⁰ A. Van Schaik, *op. cit.*, hlm. 38.

⁹¹ *Kroniek Stadsgemeente Malang 1914-1939, op. cit.*, hlm. LXXI.

dibawah kepemimpinan M.Vlierboom, klinik ini membangun kamar *Paviljoen* atau kamar VIP yang digunakan untuk ruangan suster. Bangunan ini berada di antara ruang operasi dan barak pasien. Ruangan tersebut termasuk satu ruangan untuk rekreasi suster-suster perawat. Ruang rekreasi atau *recreatie-kamer* ini berukuran 7x7 meter.⁹² Didalam sini para suster bisa beristirahat disela-sela tugasnya dan juga ruangan yang kondusif untuk belajar.

Sementara itu Walikota Bussemaker menyarankan untuk didirikan kembali sebuah rumah sakit yang bisa menampung golongan bawah baik orang-orang Eropa, Pribumi maupun Timur Asing. Rumah sakit yang bernama *Zendingsziekenhuis te Soekoen* ini berdiri tahun 1927 juga mendapatkan subsidi sebesar f 1000 setiap bulan. Berbagai fasilitas terutama kemudahan-kemudahan berobat bagi kalangan minoritas yang berarti materi tersedia dan memang disediakan di rumah sakit ini.⁹³ Begitulah dana subsidi yang pemerintah keluarkan, semua digunakan untuk tercapainya sebuah masyarakat yang sehat dan sejahtera sampai pada golongan bawah. *Zendingsziekenhuis* merupakan rumah sakit pemerintah, bagian-bagian yang tersedia didalamnya menurut instruksi walikota adalah: *pertama*, apotik; bagian bedah; bagian *Rontgen* dan sebuah ruang pengasingan bagi jenis penyakit menular. *Kedua*, disediakan ruangan khusus bagi pasien yang kurang mampu sebanyak 30 *bed* serta ruang persalinan. *Ketiga*,

⁹² Verslag Over het Jaar 1930, Malangsche Ziekenverpleging 'De Lavalette Klienik te Malang' (-/ 742).

⁹³ A. Van Schaik, *loc. cit.*

penyediaan ambulance yang telah diatur oleh bagian rumah sakit.⁹⁴ Tahun yang sama sebuah poliklinik yang berbasis Islam yang bernama poliklinik *Moehammadiyah* dibuka pada bulan September. Dua tahun kemudian ganti golongan Cina mendirikan poliklinik *Tiong Hwa Le Sia* di Kotalama untuk memenuhi kebutuhan kesehatan intern golongannya.⁹⁵

RKZ (*Roomsche Katholik Ziekenhuis*) *St. Magdalena Postel* adalah sebuah rumah sakit Katholik yang didirikan di Sawahan pada tanggal 1 Desember 1929. Rumah sakit ini memiliki kapasitas 180 *bed*, 50 *bed* diantaranya dikhususkan untuk kaum minoritas atau masyarakat tidak mampu. Rata-rata kehadiran dalam sehari mencapai 106 pasien.⁹⁶

Antara tahun 1939 dalam sebuah data kependudukan, angka kematian sangat tinggi menyerang masyarakat karesidenan ini. Sebanyak tujuh kasus endemi dengan jumlah 337 penderita yang sempat ditangani di rumah sakit, sebanyak 57 jiwa meninggal dunia.⁹⁷

⁹⁴*Zendingziekenhuis te Soekoen* ini diketahui sebagai rumah sakit pemerintah sejak tahun 1929. lihat *Kroniek Stadsgemeente Malang 1914-1939*, *op. cit.*, hlm., LXXII.

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ B.J. Boddeke, O.F.M.Cap. *op. cit.*, hlm. 1-3.

⁹⁷ *Indisch Verslag 1940. Statistisch Jaaroverzicht van Nederland-Indie Over het Jaar 1939*. no. boks/no. berkas 44/827, nomer reg. 310. Ind. 1940.

BAB IV

SOSIAL-EKONOMI PERKOTAAN